

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wacana perempuan sebagai pemimpin sudah lama diperdebatkan, perihal citra perempuan ideal dalam sejarah islam, al-qur'an sendiri menuliskan bahwa perempuan yang ideal adalah ia yang memiliki kemandirian politik dan kemandirian secara ekonomi. Tentu dalam hal kepemimpinan perempuan juga berpotensi mengatur sebuah roda organisasi. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai *khalifatun fi al-ardl*, yang akan mempertanggung jawabkan tugas-tugas kehalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.¹

Quraish Shihab dalam sebuah pengantar buku argument kesetaraan jender menuliskan bahwa tiada perbedaan tingkat kecerdasan maupun kemampuan berfikir antara kedua jenis kelamin itu. Al-Qur'an memberikan pujian terhadap "*Ulu 'l-albab*" yaitu berdzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, dzikir dan pikir yang dapat mengantarkan manusia mengetahui rahasia alam raya. *Ulu 'l-albab*, tidak terbatas pada kaum laki-laki saja, tetapi juga perempuan, *Ulu 'l-albab* diuraikan dalam Al-Qur'an surah ali Imran ayat 195.

Perempuan sama halnya laki-laki yang diberikan kesempatan untuk mempergunakan akal dan fikiranya untuk memimpin. Fenomena Perempuan memimpin suatu organisasi, lembaga, instansi, maupun pemerintahan masih jadi

¹ Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Jender perspektif Al-Qur'an*. (Jakarta : Paramadina, 2001). Hal. 253

topik menarik dibicarakan, tentu karena masih adanya mitos gender yang berkembang pada struktur sosial masyarakat Indonesia.

Gender masih sama halnya dengan kelompok etnis atau ras, dalam banyak kelompok masyarakat masih menjadi salah satu faktor penentu status seseorang. Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita dengan ejaan "gender". Gender diartikan sebagai "interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian karya yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.

Puji Laksono dalam Jurnal Konstruksi Gender di Pesantren menuliskan bahwa Gender adalah sebuah bentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan bersifat (*behavioral differences.*) Sedangkan seks lebih merujuk pada perbedaan jenis kelamin yang secara biologis melekat pada diri perempuan, dan laki-laki.² Sementara gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial budaya, psikologis dan aspek-aspek non biologis lainnya. Secara fisik biologis, laki-laki dan perempuan tidak saja dibedakan oleh identitas jenis kelamin, bentuk dan anatomi biologi lainnya, melainkan juga komposisi kimia dalam tubuh. Perbedaan yang terakhir ini menimbulkan akibat-akibat fisik biologis seperti laki-laki yang mempunyai suara lebih besar, berkumis, berjenggot, pinggul lebih ramping dan dada yang datar. Sementara perempuan mempunyai suara

² Puji Laksono, Konstruksi Gender Di Pesantren (Studi Kualitatif pada Santriwati Nurul Ummah Mojokerto), Lakon, vol 6, No. 1 Edisi Noovember 2017

lebih bening, buah dada menonjol, pinggul umumnya lebih besar dan organ reproduksi yang amat berbeda dengan laki-laki.³

Pada era industrialisasi ini perempuan pada beberapa kasus perempuan masih ditempatkan pada urusan-urusan *macak, masak, manak* atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan berdandan, memasak, dan reproduksi, artinya berkuat pada mitos ibu rumah tangga haruslah ada didapur, feminis menyebutnya dengan ruang private. Sistem patriarki semacam ini masih terus menjadi budaya yang dilakukan karena mitos gender terkait identitas femininitas pada perempuan yang tidak mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bertempat di sektor publik. Namun pada karya tulis ini justru penulis ingin menyampaikan bahwasannya identitas gender dengan kelamin perempuan yang feminine dan memiliki jiwa ibu-isme justru membantu progresifitas perubahan sosial dalam birokrasi pemerintahan maupun masyarakat.

Perempuan dan politik sangat menarik untuk diperbincangkan dari banyak perempuan yang menduduki ruang publik dan memiliki posisi penting diruang publik masih jarang perempuan yang memiliki semangat gerakan feminis untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender, disisi lain politis perempuan tak menjadikan hak perempuan seperjuangan utama.⁴ Pelaku birokrasi hari ini harus memperhatikan secara lebih spesifik konteks profesi, struktur kekuasaan, dan karakteristik profesi

³ Nur Sayyid Kristeva. *Idelogi Gender, Feminisme dan Pembangunan*. (Ponpres Almadaniyyah, Cilacap : Program Khusus Pesantren Pergerakan se-Nusantara, Juni 2016)

⁴ Usep Hasan S. *Terus berharap pada politik perempuan*. *Jurnal Perempuan* edisi 70 Juli 2011. Hal 132

perempuan yang sesungguhnya “berbeda” dari laki-laki, dan pada skala tertentu, atau lebih sering, perempuan dipaksa menjadi “laki-laki” dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaan dalam tata kelola pemerintahan (*governance*).⁵ Secara umum, laki-laki lebih aktif dalam politik dibandingkan perempuan. Partisipasi perempuan dan laki-laki yang hampir sama besar hanya terjadi ketika memilih calon legislatif, sementara ketika masa kampanye partisipasi perempuan sangat minim di ruang publik. Berdasarkan tingkat partisipasi Pemilihan Umum (Pemilu) dan kampanye, perbedaan ini tidak sekedar disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin.

Pandangan akan politik yang identik untuk laki-laki dengan karakter maskulinnya secara tidak langsung menyebabkan perempuan yang ingin terlibat dalam dunia politik khususnya berkuasa dan memimpin akhirnya harus menjadi maskulin serta harus menghilangkan kefemininan dalam dirinya. Oleh karena itu, perlu diperkenalkan arti politik yang lebih feminin menurut definisi perempuan dimana kekuasaan kepemimpinan mencakup kemampuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih berharkat sesuai hakikat perempuan sebagai pengasuh dan pemelihara. Kekuasaan perempuan juga meliputi gagasan untuk memberdayakan orang lain karena bagi perempuan, kekuasaan yang terkandung dalam kepemimpinan lebih dimaknai dengan keinginan untuk mensejahterakan orang lain seperti halnya kekuasaan seorang ibu

⁵ Dewi Candraningrum. *Raison d'être Pengarusutamaan Gender dalam Kabinet Kerja 2014-2019: Perempuan, Nalar Keadilan & Tata Kelola Pemerintahan*. Jurnal Perempuan edisi 83 Vol. 19 No. 4, November 2014, 317-326. Hal 318

yang membimbing keluarganya.⁶ Berbagai permasalahan terkait perempuan yang ada tersebut perlu diminimalisir bahkan diatasi salah satunya melalui penguatan peran perempuan dalam ranah publik ataupun politik. Upaya untuk meningkatkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki ini sudah diakui dunia internasional menjadi suatu isu yang penting. Pasca mengikuti Konferensi Perempuan internasional I yang diselenggarakan PBB di Mexico City tahun 1975, sejak itu pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mengupayakan terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender. Hal tersebut di tunjukkan dengan pembentukan Kementrian Muda Urusan Peranan Wanita (kini Kementrian Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2000), kemudian pada tanggal 18 Desember 1979 dalam sidang umum PBB ditetapkan CEDAW atau ICEDAW (*International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dimana Indonesia turut meratifikasinya.

Selain itu, hadir pula UU RI No.39 Tahun 1999 Pasal 46 tentang hak keterwakilan perempuan dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Komitmen Pemerintah Indonesia kembali diwujudkan dalam Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan menjadi semakin terperinci dengan dikeluarkannya UU RI No.10 Tahun 2008 terkait penetapan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30%. Keterwakilan politik perempuan secara normatif memiliki potensi dampak, termasuk sebagai upaya untuk meningkatkan potensi, peran, kesejahteraan, dan hak-hak kaum

⁶ Siti Musdah Mulia dan Anik Farida. Perempuan dan Politik. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005) hal. 25

perempuan.⁷ Pemimpin perempuan memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk mempengaruhi perempuan lainnya melalui kebijakannya ataupun secara kepribadiannya. Secara simbolik, kehadiran perempuan dalam politik ditunjukkan dalam jumlah perempuan yang terlibat dalam proses politik. Kehadiran perempuan dalam politik harus dikembangkan hingga tidak hanya secara simbolik saja, melainkan menjadi lebih substansial dimana kehadiran perempuan diharapkan mampu mewakili atau merepresentasikan berbagai aspirasi dan kepentingan perempuan untuk diangkat keranah publik dan politik. Pitkin (1967) menjelaskan konsep dasar representasi pada intinya yaitu dimana terdapat orang-orang yang diwakili (*represented*) hadir diwakili oleh orang-orang yang mewakili (*representatives*) melalui tindakan representasi yang dijalankannya.⁸

Kehadiran Ika Puspitasari sebagai Wali Kota Mojokerto, memberi angin segar bagi birokrasi Kota Mojokerto, sebab beliau adalah pemimpin perempuan pertama Kota Mojokerto. 10 Desember 2018 menjadi hari bersejarah bagi Wali Kota yang kerap disapa Ning Ita, pasalnya hari dimana Ning Ita menyatakan sumpah untuk mengemban amanah dan mengabdikan diri menjadi Pemimpin Kota Mojokerto sampai masa bhakti 2018-2023.

⁷ Nuriel Baetha Annida, Implikasi Hadirnya Pemimpin Perempuan Terhadap Representasi Politik Substantif Perempuan Di Kota Tangerang Selatan (Studi Kasus Wali Kota Airin Rahchmi Diany), Skripsi Universitas Padjajaran 2019

⁸ Hanna F. Pitkin. The Concept Of Representation. (London : University of California Press, 1967)

Pilwali Kota Mojokerto tahun 2018 merupakan topik perbincangan masyarakat Mojokerto Raya yang renyah, pasalnya tahun tersebut tahun yang berat bagi keluarga Ning Ita. Mustofa Kamal Pasa, kakak kandung Ika Puspitasari pada saat itu merupakan Bupati Kabupaten Mojokerto yang pada saat pencalonan Ning Ita menjadi Wali Kota Mojokerto, tengah tersandung dugaan kasus tindak pidana pencucian uang. Mantan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa merupakan terpidana dalam kasus suap terkait pembangunan menara telekomunikasi di Mojokerto, dan di vonis hukuman delapan (8) tahun penjara, selain menyangang terpidana dalam kasus suap Mustofa Kamal Pasa juga ditetapkan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dalam kasus suap proyek jalan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.⁹

Isu tersebut tidak mematahkan semangat Ning Ita dalam bakal pencalonan Wali Kota, pada 10 Januari 2018 dengan sang bakal calon Wali Kota Ahmad Rizal Zakariyah, memberanikan diri berangkat ke KPU untuk mendaftarkan diri sebagai calon wali kota dan wakil wali Kota Mojokerto. Semangat juang Ning Ita dalam rangka hajatnya membenahi Kota Mojokerto, didukung oleh dua (2) partai besar di Kota Mojokerto, yakni Gerindra dan Golkar.

“Ketua dan Sekretaris Partai Gerindra yang sekaligus ketua tim kemenangan ning ita-cak rizal, dan ketua tim kemenangan dari DPP Golkar Provinsi Jawa Timur, dan yang saya banggakan seluruh kader dan relawan yang hadir menyertai Ning Ita-Cak Rizal pendaftaran ke KPU Kota Mojokerto, Syukur Alhamdulillah mengikuti kontestasi pilwali Kota Mojokerto, ucapan terima kasih kami

⁹ KPK Periksa Wali Kota Mojokerto Terkait kasus Suap Kakak kandungnya, 24 Januari 2020. Youtube KOMPAS TV. Diakses pada : 16 Juli 2021 pukul 20.25 WIB.

*ucapkan kepada kedua partai pengusung, partai gerindra dan partai golkar” sambutan Ning Ita pada saat mendaftarkan diri di KPU Kota Mojokerto*¹⁰

Pada perjalanan Ning Ita memimpin Kota Mojokerto, Adik dari MKP ini kerap memperoleh penghargaan mulai dari Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Terbaik III dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Jawa Timur pada 15 April 2021.

*“Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) ini berdasarkan atas dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan proses penyusunan RKPD. Selain itu, juga dinilai pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD serta inovasi yang dikembangkan masing-masing daerah, Kita patut berbangga bahwa diraihnya Penghargaan Pembangunan Daerah merupakan pengakuan keberhasilan Kota Mojokerto. Dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan serta pencapaian pembangunan daerah dilakukan dengan baik. Selain itu, Kota Mojokerto dinilai mampu melaksanakan keterpaduan pembangunan pusat dan daerah,” ungkap Ning Ita.*¹¹

Pemkot Mojokerto dibawah kepemimpinan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dipenghujung tahun 2020. Pada *moment* ini, Ning Ita menerima penghargaan sebagai pemerintahan daerah yang sangat inovatif pada *Innovative Government Award (IGA)* Tahun 2020 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Bagaimana tidak memperoleh prestasi inovatif, produk inovasi daerah sebagai hasil kreatif Pemkot Mojokerto antara lain, Ngarang Biji, Brantas tuntas, (Berita anak terkini di sekolah

¹⁰ Sambutan Ning Ita di KPU Kota Mojokerto pada saat pendaftaran Pilwali Kota Mojokertom, 11 Januari 2018. Youtube jayak mardiansyah diakses pada 17 Juli 2021 pukul 15.17 WIB

¹¹ <https://www.google.com/amp/s/nusadaily.com/jatim/lagi-ning-ita-terima-penghargaan-kali-ini-pembangunan-daerah-terbaik-kategori-kota-se-jatim.html%3famp>, diakses pada 17 Juli 2021, pukul 16.15 WIB

orang tua nyaman, tenang dan puas), GAYATRI (Gerbang Layanan Informasi Terpadu dan Terintegrasi), Pete Jawa Rasa Timun (Pemeriksaan Terpadu Pekerja Wanita dengan Pemeriksaan Risiko Penyakit Tidak Menular), Pos tensi oke oye sip dan Revanol (Registrasi Via Online).¹²

Aplikasi yang sudah mengatarkan Ning Ita memperoleh penghargaan *Innovative Government* kembali mendapat sorotan, dimana gayatri masuk Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020, hal tersebut diapresiasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Selama ini, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita ini sangat perhatian dalam memperbaiki layanan kesehatan di Kota Mojokerto. Terlebih, menyangkut warga yang telah lanjut usia (lansia), stunting (kondisi gagal pertumbuhan pada anak), ibu hamil, pemulihan gizi, dan masih banyak lainnya.¹³

Bila diperhatikan periodisasi kepemimpinan perempuan pertama Kota Mojokerto ini mengalami progresifitas yang signifikan, Ning ita Sendiri merupakan sosok yang memiliki sikap yang peduli, memiliki jiwa ke-ibu-an, dan tentu tidak meninggalkan pemikiran feminis dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Mojokerto. Ika Puspitasari merupakan representasi pemimpin perempuan yang mampu berada diranah eksekutif, dengan beban ganda yang masih diterima secara

¹² <https://memorandum.co.id/pemkot-mojokerto-raih-penghargaan-innovative-government-award-2020/>, diakses pada 17 Juli 2021 pukul 16.25 WIB

¹³ <https://www.google.com/amp/s/jatim.antaranews.com/amp/berita/434596/awali-satu-data-di-indonesia-aplikasi-gayatri-kota-mojokerto-raih-penghargaan-kementerian-pan-rb>, di akses pada 17 Juli 2021, pukul 16.43 WIB

kultural yakni sebagai seorang ibu dan istri menurut konstruksi Ibu-isme Negara menurut Julia Suryakusuma dalam bukunya.

Melansir dari beritajatim.com oleh Ning Ita menerima penghargaan dari inovasi pelayanan publik (Kovablik) Jawa Timur 2020 Program tersebut diberi judul Pete Jawa Rasa Timun, dimana program tersebut merupakan layanan kesehatan yang dikhususkan bagi pekerja wanita. Dimana, inovasi Pete Jawa Rasa Timun hadir karena adanya beberapa permasalahan di lingkungan perusahaan yang kerap menyelimuti kaum hawa. Hal tersebut membuktikan bahwa Ning Ita sebagai representasi kepemimpinan perempuan yang memiliki nilai juang terhadap sesama perempuan. Selanjutnya, dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai seorang feminis ibu dua anak ini mengambil jalan dengan mengambil kebijakan Peraturan Wali Kota Mojokerto No 17 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender. Hal yang menarik untuk diteliti, yakni pola komunikasi ibu-isme yang digunakan pemimpin perempuan dalam menjalankan roda eksekutif di Kota Mojokerto sehingga mampu menciptakan kebijakan yang responsif gender.

Representasi perempuan dalam politik sesungguhnya tidak boleh hanya melulu pada persoalan gender (secara esensialis menyangkut “kuota perempuan”), tetapi harus juga merangsang dalam sistem politik dan sistem pemerintahan,¹⁴ dalam konteks internasional dan nasional atas posisi profesional politisi perempuan. Ini memiliki makna lebih luas lagi, yaitu pengarusutamaan gender

¹⁴ Dewi Candraningrum. *Raison d'être Pengarusutamaan Gender dalam Kabinet Kerja 2014-2019: Perempuan, Nalar Keadilan & Tata Kelola Pemerintahan*. Jurnal Perempuan edisi 83 Vol. 19 No. 4, November 2014, 317-326. Hal 318.

dalam sistem pandangan dunia politik kenegaraan dan tata kelola pemerintahan. Tulisan ini menyadari bahwa sistem pandangan dunia politik kenegaraan, eksekutif dan birokrasi masih menampilkan wajah lama yang melanggengkan ketidakadilan gender dan budaya Patriarki.

Chabibi dalam jurnalnya berjudul ulama perempuan Indonesia : resistensi terhadap konstruksi sosial patriarki, menjelaskan bahwa Patriarki dalam objek feminisme kritis didefinisikan sebagai sistem otoritas dan dominasi kelompok laki-laki atas perempuan yang terinstitusionalkan di dalam dunia natural secara keseluruhan.¹⁵

Budaya patriarki di Kota Mojokerto masih ada, dimana paradigma masyarakat terhadap politik dan perempuan masih minim dibuktikan dengan Data dari BPS Mojokerto dalam terbitannya berjudul Mojokerto Dalam Angka Tahun 2021” dimana didalamnya terdapat data jumlah perempuan yang duduk dalam kursi legislative tidak mencapai target 30%, jika disebutkan jumlahnya hanyalah 4 orang tentu sangat jauh dari angka target atau ruang yang diberikan perundang-undangan.

¹⁵ Muhammad Chabibi, ulama perempuan Indonesia : resistensi terhadap konstruksi sosial patriarki, asketik, vol. 5 no. 1 juli 2021 | 081-097

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Komunikasi Ibu-isme Wali Kota Ika Puspitasari Dalam Mengambil Kebijakan Peraturan Wali Kota Mojokerto No 17 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Representasi komunikasi ibu-isme dalam Kepemimpinan Perempuan pada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua (2) yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Adapun uraian masing-masing kegunaan penelitian tersebut diatas yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ide dan memberikan wawasan serta ilmu baru bagi program penelitian Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Pesantren KH. Abdul Chalim.
- b. Mengembangkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan dan menambah pengetahuan pembaca tentang komunikasi ibu-isme dalam kepemimpinan perempuan dan gerakan perempuan di Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data penunjang dan bahan evaluasi bagi Ika Puspitasari selaku Wali Kota Mojokerto serta bagi birokrasi Pemerintah Kota Mojokerto dalam menjalankan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan gender, disabilitas, maupun anak-anak.